

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANIK DWI HASTUTI
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 883924

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	900.000.000
1. Tanah Seluas 554 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI		
Rp. 50.000.000		
2. Tanah Seluas 147 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI		
Rp. 100.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/60 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI		
Rp. 750.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	100.000.000
1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI	Rp.	
100.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	79.950.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	107.833.175
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.187.783.175
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.187.783.175

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.